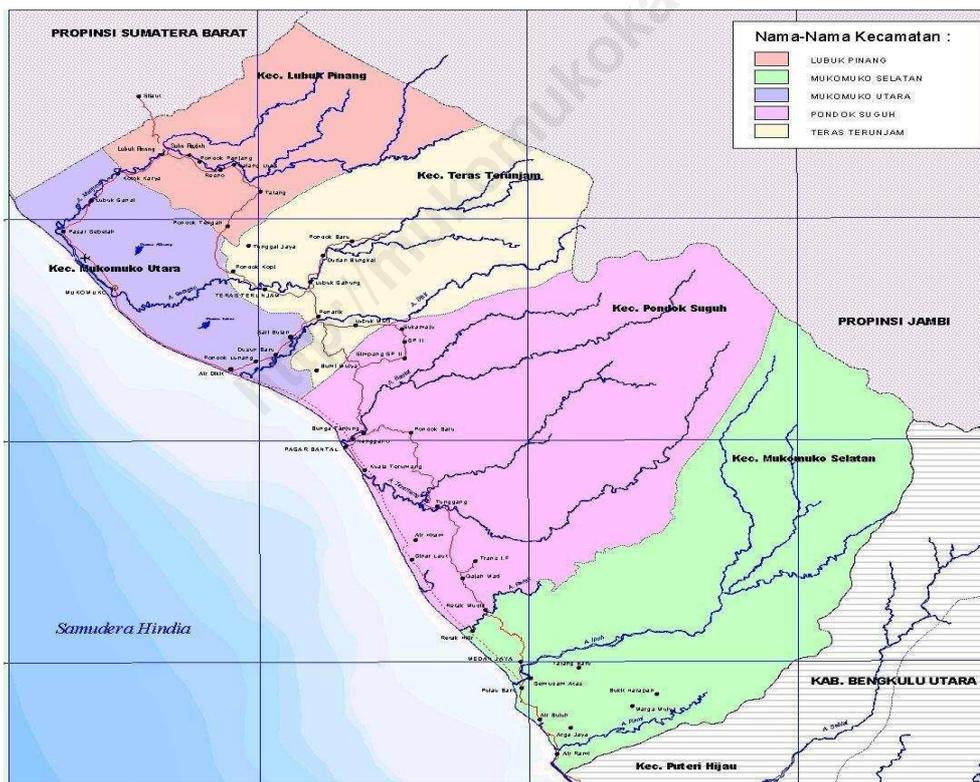


Indek Pembangunan Manusia KABUPATEN MUKOMUKO 2007



Kerjasama
BAPPEDA KABUPATEN MUKOMUKO
Dan
BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BENGKULU UTARA

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2007
HUMAN DEVELOPMENT INDEX OF MUKOMUKO REGENCY 2007

Nomor Publikasi/*Publication Number* : 17065.0705
Katalog BPS/*BPS Catalog* : 4102002. 1706

Ukuran Buku/*Book Size*: 21 x 28
Jumlah Halaman/*Number of Pages* : 32

Naskah/*Manuscript*:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik- BPS Kabupaten Mukomuko &
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik- BPS Propinsi Bengkulu

Division Of Regional Accounts and Statistical Analysis

BPS – Statistic of Mukomuko Regency &

Division Of Regional Accounts and Statistical Analysis

BPS – Statistic of Bengkulu Province

Gambar Kulit/*Cover design*:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Division of Regional Accounts and Statistical Analysis

Diterbitkan Oleh/*Published by* :

BPS Kabupaten Mukomuko &

Bappeda Kabupaten Mukomuko

BPS – Statistic of Mukomuko Regency &

Development Planning Agency of Mukomuko Regency

Boleh Dikutip Dengan Menyebut Sumbernya

May be Cited With Reference to the Source

BPS Kabupaten Mukomuko



KATA SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada tahun 2008 ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Mukomuko dapat menerbitkan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Mukomuko 2007.

Sehubungan dengan penerbitan publikasi ini, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Mukomuko, saya mengucapkan terima kasih kepada BPS Kabupaten Mukomuko beserta segenap jajarannya, yang telah berupaya menyusun dan menyajikan data dan analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Mukomuko 2007 ini. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu sehingga proses penyusunan publikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Kami menyadari bahwa penyajian publikasi ini masih belum optimal. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pengguna data akan kami terima dengan senang hati demi perbaikan dan penyempurnaan publikasi berikutnya. Harapan kami semoga publikasi ini dapat memenuhi harapan dan berdayaguna serta berhasil guna bagi kita semua.

Mukomuko, Oktober 2008

Bappeda Kabupaten Mukomuko
Kepala,

Izharudin, SE, .M.Si
NIP. 131771814



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada tahun 2008 ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko dapat menerbitkan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Mukomuko 2007.

Publikasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna data terhadap informasi IPM Kabupaten Mukomuko berikut perbandingannya dengan tahun sebelumnya. Data yang disajikan dalam publikasi ini menggambarkan IPM Kabupaten Mukomuko 2007. Publikasi ini menyajikan tabel dan pembahasan yang sederhana dan mudah difahami sehingga para pengguna data baik sebagai perencana, peneliti serta penentu kebijakan dapat menggunakan dan menganalisis data IPM Kabupaten Mukomuko.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu sehingga proses penyusunan publikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Kami menyadari bahwa penyajian publikasi ini masih belum optimal. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pengguna data akan kami terima dengan senang hati demi perbaikan dan penyempurnaan publikasi berikutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan para pengguna data.

Mukomuko, Oktober 2008

BPS Kabupaten Mukomuko
Kepala,

Ir. Marwansyah
NIP. 340014037

DAFTAR ISI

		hal
KATA SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA		ii
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GAMBAR		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan	2
	1.3. Jenis dan Sumber Data	2
	1.4. Ruang Lingkup	3
	1.5. Sistematika Penyajian	4
BAB II	Metodologi	5
	2.1. Indikator	6
	2.2. Metode Analisis	7
	2.3. Konsep dan Definisi	13
BAB III	ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN MUKOMUKO	14
	3.1. Indeks Pembangunan Manusia	16
	3.2. Angka Harapan Hidup	17
	3.3. Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah	19
	3.4. Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan	22
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	24
	4.1 Kesimpulan	24
	4.2 Saran	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nilai Maksimum dan Nilai Minimum komponen IPM	Hal 11
Tabel 2	Klasifikasi Status Pembangunan Manusia	12
Tabel 3	Diagram Analisis Situasi Pencapaian Pembangunan Manusia..	15

<http://mukomukokab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu Tahun 2006-2007	16
Gambar 2 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu Tahun 2006-2007 (tahun)	18
Gambar 3 Angka Melek huruf Kabupaten/kota se-Propinsi Bengkulu Tahun 2006-2007 (persen)	20
Gambar 4 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/kota se-Propinsi Bengkulu Tahun 2006-2007 (tahun)	21
Gambar 5 Pengeluaran Per kapita Riil Disesuaikan Kabupaten/kota se-Propinsi Bengkulu Tahun 2006-2007 (Rp. 000)	23

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam menghadapi era globalisasi yang tengah memasuki pasar bebas diperlukan sumberdaya-sumberdaya manusia yang berkualitas yang mampu bersaing ketat di dalamnya. Untuk itu, pemerintah lebih menekankan pembangunan yang terpusat pada manusia sendiri sejalan dengan konsep pembangunan manusia sebagaimana diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pertama kali diperkenalkan oleh UNDP (*United Nation Development Program*). Indeks pembangunan manusia merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia yang telah distandarkan secara internasional dan khusus untuk Indonesia telah mulai disajikan sampai level kabupaten pada tahun 2001.

Mengingat arti penting indeks pembangunan manusia tersebut demi kemajuan suatu negara yang dalam hal ini mencakup kabupaten Mukomuko sebagai kabupaten termuda di propinsi Bengkulu yang mesti turut serta melakukan penghitungan IPM untuk mengetahui kondisi wilayahnya sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh kabupaten-kabupaten lain di Indonesia, maka IPM yang mencakup tiga dimensi dasar pembangunan manusia yakni harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak menjadi salah satu alat ukur yang tepat untuk digunakan. Terlebih lagi karena IPM merupakan salah satu instrumen untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) daerah.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penghitungan IPM meliputi tiga aspek kehidupan yang berfokus pada peningkatan kualitas penduduk sebagai subjek pembangunan nasional. Ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fisik

Dari aspek fisik bertujuan untuk mengetahui kesehatan penduduk yang diukur dengan angka harapan hidup.

2. Mental

Dari aspek mental bertujuan untuk mengetahui pendidikan penduduk yang diukur dengan angka melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah.

3. Kesejahteraan Ekonomi

Dari aspek kesejahteraan ekonomi bertujuan untuk mengetahui daya beli penduduk yang diukur dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*).

1.3 JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang dikumpulkan dalam penghitungan IPM ini adalah :

a. Data Fertilitas, meliputi :

- Rata-rata anak lahir
- Rata-rata anak masih hidup
- Usia perkawinan pertama bagi wanita
- Rasio anak lahir hidup menurut kelompok umur ibu

- Rasio anak masih hidup menurut kelompok umur ibu
- b. Data Pendidikan, meliputi :
- Kemampuan membaca dan menulis
 - Jenjang Pendidikan yang pernah/sedang diduduki
 - Tingkat kelas yang pernah /sedang diduduki
- c. Data pengeluaran konsumsi per kapita
- Pengeluaran konsumsi makanan
 - Pengeluaran konsumsi non makanan

Data yang digunakan dalam penyusunan IPM ini sebagian besar mengambil sumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) tahun 2007. Diharapkan dengan adanya keseragaman sumber data dan konsep definisi yang digunakan dalam setiap penghitungan IPM, akan memungkinkan bagi kita untuk membuat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dengan Daerah Tingkat II lainnya secara nasional. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan apabila ada pihak lain yang melakukan penghitungan dengan sumber data yang berbeda akan menghasilkan angka yang berbeda pula.

1.4. RUANG LINGKUP

Mengingat sumber data yang digunakan dalam penyusunan IPM ini sebagian besar bersumber kepada hasil SUSENAS yang pelaksanaan pengumpulan datanya memakai metode sampling dengan jumlah sampel yang relatif terbatas, maka akurasi dari indikator-indikator yang dihasilkan akan sangat tergantung dari seberapa besar sampling maupun non sampling error yang terkandung didalamnya.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Buku Indeks Pembangunan Manusia tahun 2007 ini terbagi kedalam 4 bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang menyajikan

- ✓ Latar belakang,
- ✓ Tujuan,
- ✓ Jenis dan sumber data,
- ✓ Ruang lingkup,
- ✓ Sistematika penyajian

Bab II : Metodologi, yang menyajikan

- ✓ Indikator,
- ✓ Metode analisis,
- ✓ Konsep dan definisi.

Bab III : Analisis Pembangunan Manusia Kabupaten Mukomuko, yang menyajikan

- ✓ Indeks Pembangunan Manusia
- ✓ Angka Harapan hidup
- ✓ Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah
- ✓ Pengeluaran perkapita Riil Disesuaikan

Bab IV : Kesimpulan dan saran

- ✓ Kesimpulan,
- ✓ Saran.

BAB II

METODOLOGI

Pembangunan manusia menurut definisi UNDP (1990) merupakan model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Pemberdayaan penduduk ini dapat dicapai melalui upaya yang menitik beratkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatkan derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya dan politik. Upaya terhadap peningkatan kemampuan dasar manusia berarti juga pemenuhan akan hak asasi. Yaitu hak untuk menikmati usia yang lebih panjang, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk dapat hidup layak.

Untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan disuatu wilayah digunakan suatu indeks komposit, yaitu **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** atau *Human Development Index (HDI)*. Walaupun indikator tersebut tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar manusia. Kemampuan dasar tersebut adalah umur panjang dan sehat yang diukur dengan Angka Harapan Hidup waktu lahir, pengetahuan yang diukur dengan angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf, serta standar hidup layak yang diukur dengan kemampuan daya beli. Dan dikatakan indeks komposit karena dibentuk dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Daya Beli Penduduk.

2.1. INDIKATOR

Indikator merupakan petunjuk yang memberikan indikasi tentang suatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Dalam definisi lain, indikator dapat dikatakan sebagai variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan lain :

- 1) Sahih (valid), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut,
- 2) Obyektif, untuk hal yang sama indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda,
- 3) Sensitif, perubahan yang kecil mampu terdeteksi oleh indikator,
- 4) Spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud, namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB), dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari tiga jenis indikator yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup dari anak usia satu tahun (AHH_{e1}). Menurut jenisnya indikator dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Indikator input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio penduduk-dokter, rasio penduduk-puskesmas dan lain sebagainya.
- 2) Indikator proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Jumlah Jam Kerja, Rata-rata Jumlah Kunjungan ke Puskesmas, Persentase Proses Kelahiran Yang Ditolong Oleh Dukun.
- 3) Indikator Output/Outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti : persentase penduduk dengan pendidikan SMU/setara ke atas, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH) dan lain-lain.

2.2. METODE ANALISIS

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari Indeks Harapan Hidup (e_0), Indeks pendidikan (angka melek huruf ditambah dengan rata-rata lama sekolah), dan Indeks Daya Beli Penduduk (standar hidup layak). Penjelasan mengenai indeks-indeks tersebut sebagai berikut:

a. Komponen Usia Hidup (*Longevity*)

Usia hidup (*longevity*) diukur dengan indeks Angka Harapan Hidup, sebenarnya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup. Namun dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, maka UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (*life Expectancy at birth*) sebagai salah satu komponen untuk

penghitungan IPM. Untuk menghitung angka harapan hidup ini digunakan metoda tidak langsung dengan menggunakan dua macam data dasar, yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Sumber data yang dapat digunakan untuk penghitungan angka harapan hidup ini adalah dari Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Setelah diperoleh angka harapan hidup waktu lahir, selanjutnya dihitung indeksnya dengan membandingkan angka tersebut terhadap angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini UNDP telah menetapkan nilai minimum dan maksimum untuk angka harapan hidup, yaitu masing-masing 25 tahun dan 85 tahun, lihat tabel 1).

b. Komponen Pengetahuan (*Knowledge*)

Sementara itu komponen pengetahuan diukur menggunakan dua variabel, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf penduduk dewasa, dapat diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis yang dihasilkan dari Susenas Kor. Sedangkan untuk memperoleh angka rata-rata lama sekolah (*mean years of Schooling; MYS*) dihitung dengan mengolah dua variabel secara simultan, yaitu : tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Angka-angka inipun diolah dari angka Susenas Kor. Penghitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, dihitung lama sekolah untuk masing-masing individu dengan menggunakan pola hubungan antar variabel. Tahap selanjutnya dihitung rata-rata lama sekolah.

c. Komponen Standar Hidup Layak (*Decent Living*)

Untuk mengukur standar hidup layak, data dasar PDRB per kapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk mengukur kemampuan daya beli

penduduk. Untuk itu penghitungan IPM menggunakan **konsumsi perkapita riil** yang telah disesuaikan untuk mengukur kemampuan daya beli penduduk, penggunaannya sendiri sudah merupakan kesepakatan dari UNDP untuk keperluan perbandingan antar wilayah/negara. Sumber data yang digunakan adalah jumlah pengeluaran perkapita yang meliputi konsumsi makanan dan konsumsi non makanan dari Susenas Kor dan Modul.

Penghitungan indikator konsumsi riil perkapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut :

- ❖ Menghitung pengeluaran konsumsi perkapita dari Susenas Modul (=A)
- ❖ Mendefinisikan nilai A dengan IHK Kabupaten Mukomuko yang sesuai (=B)
- ❖ Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit)

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus :

$$ppp / unit = \frac{\sum_j E_{i(i,j)}}{\sum_j (P_{(g,j)} \cdot q_{(i,j)})}$$

Dimana , $E_{(i,j)}$: pengeluaran untuk komoditi j di propinsi ke-i

$p_{(g,j)}$: harga komoditi j di DKI Jakarta

$q_{(i,j)}$: jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di propinsi i

- ❖ Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C)
- ❖ Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai *marginal utility* dari C.

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 C_{(i)}^* &= C_{(i)} && \text{jika } C_{(i)} \leq Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} && \text{jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} && \text{jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} && \text{jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z
 \end{aligned}$$

Dimana,

$C_{(i)}$ = Konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP / unit

Z = Treshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan yang dalam laporan ini nilai Z ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 547.500,- perkapita setahun, atau Rp 1.500,- perkapita per hari.

Rumus Penghitungan IPM

Rumus penghitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut :

$$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}] \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup

$X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah)

$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak

Catatan : a) proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk propinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 6,5 persen per tahun selama kurun 1993-2018.

b) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk propinsi yang memiliki angka terendah tahun 1990 di daerah perdesaan Sulawesi Selatan dan di Irian Jaya.

Nilai maksimum dan nilai minimum untuk komponen angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah sama seperti yang digunakan UNDP dalam menyusun IPM global sebelum tahun 1994, batasan tersebut juga digunakan BPS-UNDP, dengan demikian indeks harapan hidup dan indeks pendidikan memungkinkan untuk dilakukan perbandingan baik tingkat nasional maupun internasional. Nilainya disajikan pada tabel 1.

Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Meningkatnya pembangunan manusia dapat dilihat berdasarkan besaran/skor IPM yang dapat dicapai. Berdasarkan klasifikasi tersebut tingkat pencapaian IPM menjadi empat kategori sebagai mana tercatum dalam tabel berikut.

Tabel. 2. Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia *)
< 50	Rendah
$50 \leq \text{IPM} < 66$	Menengah Bawah
$66 \leq \text{IPM} < 80$	Menengah Atas
≥ 80	Tinggi

*) modifikasi terhadap klasifikasi UNDP, dengan memecah status menengah.

2.3. KONSEP DAN DEFINISI

<i>Angka Harapan Hidup</i>	Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk yang dilahirkan pada tahun tersebut.
<i>Angka Melek Huruf</i>	Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya).
<i>Indeks Daya Beli Masyarakat</i>	Perbandingan antara selisih nilai standar hidup layak konsumsi perkapita dengan nilai minimumnya dan selisih nilai maksimum dan minimum standar hidup layak konsumsi perkapita tersebut.
<i>Indeks Peluang Hidup</i>	Perbandingan antara selisih angka harapan hidup dengan nilai minimumnya dan selisih nilai maksimum dan minimum angka harapan hidup tersebut.
<i>Indeks Pengetahuan</i>	Penjumlahan antara indeks melek huruf dengan indeks rata-rata lama sekolah.
<i>Konsumsi Per Kapita</i>	Pengeluaran perkapita untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Sedangkan bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
<i>Rata-rata Lama Sekolah (mean years of schooling) MYS</i>	Lama sekolah (tahun) penduduk usia 10 tahun ke atas.

BAB III

ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN MUKOMUKO

Hakekat pembangunan manusia adalah pembangunan manusia seutuhnya yang dalam hal ini tentunya adalah peningkatan kualitas hidup yang tercakup didalamnya kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia seutuhnya selama ini, telah diimplementasikan pemerintah melalui pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan tersebut diharapkan akan lebih menyentuh kepada sasaran. Keberhasilannya sendiri akan tercermin dari seberapa jauh terjadinya perubahan dari kualitas hidup penduduknya. Salah satu instrumen untuk mengukur keberhasilan tersebut diantaranya adalah dengan IPM.

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko upaya untuk memacu peningkatan IPM sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup meliputi semakin baiknya derajat kesehatan, peningkatan tingkat pendidikan dan membaiknya kemampuan ekonomi masyarakat.

Untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan kualitas pembangunan manusia, tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar perubahan skor IPM-nya. Karena skor tersebut hanya memvisualisasikan kondisi secara umum dari tiga komponen indikator yang membentuk IPM tersebut. Penelaahan lebih dalam terhadap masing-masing komponen indikator IPM akan sangat membantu guna memperoleh gambaran yang lebih jelas lagi, indikator mana saja yang memberikan kontribusi paling besar terhadap peningkatan skor IPM tersebut. Bahkan akan lebih baik lagi kalau dapat dianalisis hingga pada determinan

dari masing-masing indikatornya. Karena dari situ kita akan mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya.

Tabel 3 berikut menyajikan beberapa determinan dari tiga indikator IPM, baik yang memberikan dampak langsung, sebab tidak langsung maupun sebab mendasar terhadap terjadinya perubahan masing-masing indikator.

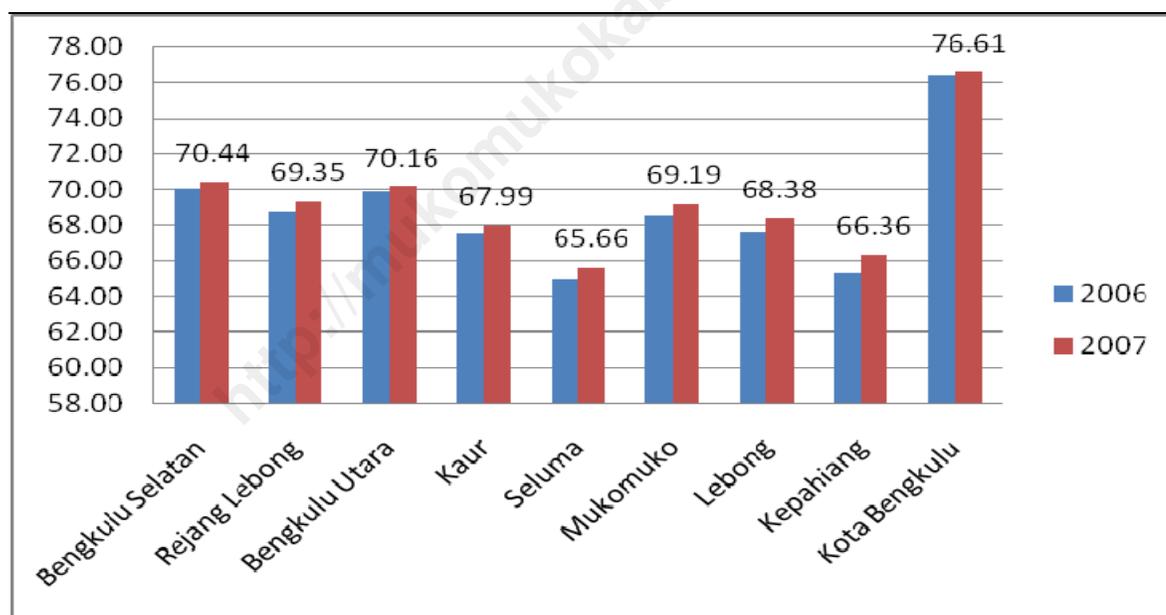
Tabel 3. Diagram Analisis Situasi Pencapaian Pembangunan Manusia

Determinan	Indikator		
	Kelangsungan Hidup (Angka kematian Bayi)	Pengetahuan (Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf)	Daya Beli (Konsumsi Perkapita)
Sebab Langsung	✓ Persentase penolong persalinan oleh tenaga medis masih rendah	✓ Tingkat partisipasi sekolah usia 13-18 tahun masih rendah	✓ Tingkat upah/pendapatan rendah
Sebab tidak Langsung	✓ Pemeriksaan antenatal, ✓ Status gizi ibu hamil	✓ Fasilitas pendidikan kurang, ✓ Biaya pendidikan mahal	✓ Kesempatan kerja kurang ✓ Produktivitas rendah, ✓ Kualitas SDM rendah
Sebab Mendasar	✓ Kemiskinan ✓ Tingkat pendidikan rendah	✓ Kemiskinan	✓ Perluasan lapangan kerja dan usaha ✓ Pembinaan terhadap UMKM

3.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Kemajuan suatu daerah, dapat dilihat dari besar kecilnya Indeks Pembangunan Manusia di daerah tersebut. Semakin tinggi IPM pada suatu daerah, dapat mengindikasikan tingginya Sumber Daya Manusia dan akan berpengaruh terhadap kemajuan di daerah tersebut. Dari Penghitungan komponen IPM, dapat dihasilkan nilai IPM untuk Kabupaten Mukomuko yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu Tahun 2006-2007



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Dari gambar 1 terlihat nilai IPM untuk seluruh kabupaten/kota di propinsi Bengkulu pada tahun 2007 mengalami peningkatan dibanding tahun 2006. Peningkatan untuk masing-masing kabupaten/kota ini tidak berbeda jauh. Sedangkan untuk tahun 2007, angka IPM Kabupaten Mukomuko sebesar 69.19. Angka ini meningkat dibanding tahun 2006

yang hanya sebesar 68.6. Dengan IPM sebesar 69.19 tersebut, maka Kabupaten Mukomuko termasuk ke dalam status pembangunan manusia ‘menengah atas’. Hal ini menunjukkan, bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Mukomuko sudah cukup baik. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Propinsi Bengkulu, maka pada tahun 2007 Kabupaten Mukomuko merupakan kabupaten dengan nilai IPM tertinggi kelima setelah Kota Bengkulu (76.61), Bengkulu Selatan (70.44), Bengkulu Utara (70.16), dan Rejang Lebong (69.35), tetapi untuk kabupaten pemekaran, IPM Kabupaten Mukomuko tertinggi. Dengan terus meningkatkan pembangunan manusia yang terbagi dalam segi pendidikan, kesehatan dan ekonomi penduduk, akan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mukomuko pada tahun-tahun mendatang.

3.2 ANGKA HARAPAN HIDUP

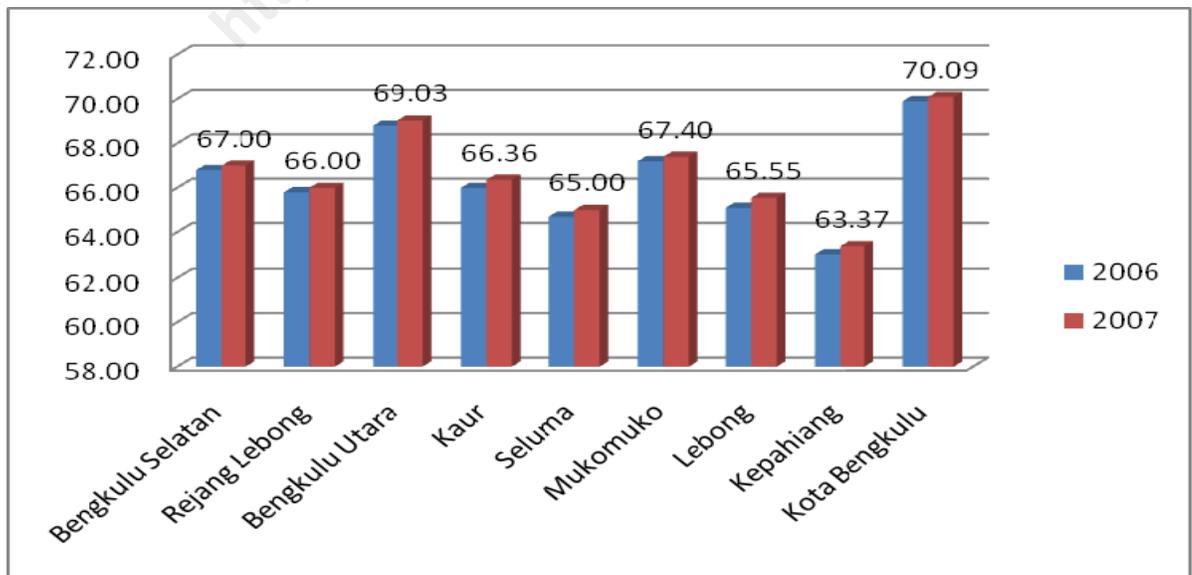
Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah selama ini, diantaranya menyediakan berbagai fasilitas puskesmas/pustu, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih.

Melalui program pembangunan dibidang kesehatan pemerintah berupaya untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana kesehatan agar dapat melayani masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, untuk penduduk miskin, Pemerintah memberikan subsidi untuk membantu membayar biaya kesehatan. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat. Sejauh mana keberhasilan pembangunan

dibidang kesehatan tentunya akan tercermin dari seberapa besar peningkatan yang terjadi pada indikator kesehatan. Sehingga cukup dapat dipahami apabila kesehatan adalah merupakan salah satu indikator yang disertakan dalam penghitungan IPM.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam indikator kesehatan adalah Angka Harapan Hidup nol tahun ($AHHe_0$). Yang didefinisikan sebagai rata-rata lamanya hidup yang mungkin dicapai oleh penduduk sejak usia nol tahun. Angka ini mempunyai hubungan terbalik dengan Angka Kematian Bayi (AKB), artinya apabila terjadi penurunan terhadap angka kematian bayi maka akan terjadi peningkatan terhadap angka harapan hidup. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kualitas kesehatan penduduk khususnya yang menyebabkan terjadinya kematian bayi, diantaranya persentase penolong persalinan oleh tenaga medis, pemeriksaan antenatal, status gizi ibu hamil dan lain sebagainya.

Gambar 2. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu Tahun 2006-2007 (tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar 2 menunjukkan Angka Harapan Hidup untuk seluruh kabupaten/kota di wilayah propinsi Bengkulu pada tahun 2007 mengalami peningkatan dibanding tahun 2006. Peningkatan untuk masing-masing kabupaten/kota ini tidak jauh berbeda. Sedangkan Angka Harapan Hidup untuk Kabupaten Mukomuko sedikit meningkat dibanding tahun 2006 yakni dari 67.2 pada tahun 2006 menjadi 67.4 pada tahun 2007. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Propinsi Bengkulu, maka pada tahun 2007 Kabupaten Mukomuko merupakan kabupaten dengan nilai Angka Harapan Hidup tertinggi ketiga setelah Kota Bengkulu (70.09) dan Kabupaten Bengkulu Utara (69.03). Bila melihat angka maksimumnya yaitu 85, maka dengan nilai yang ada menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mukomuko sudah cukup baik. Hal ini sudah tentu karena dukungan sarana dan prasarana pemerintah dalam hal kesehatan, terutama peningkatan mutu RSUD mengingat jarak Mukomuko dengan Rumah Sakit yang fasilitasnya lengkap cukup jauh. Perlu diwaspadai, penurunan sarana dan prasarana pendukung kesehatan atau semakin tingginya biaya kesehatan yang jauh dari kemampuan masyarakat untuk membayar dapat menurunkan angka ini.

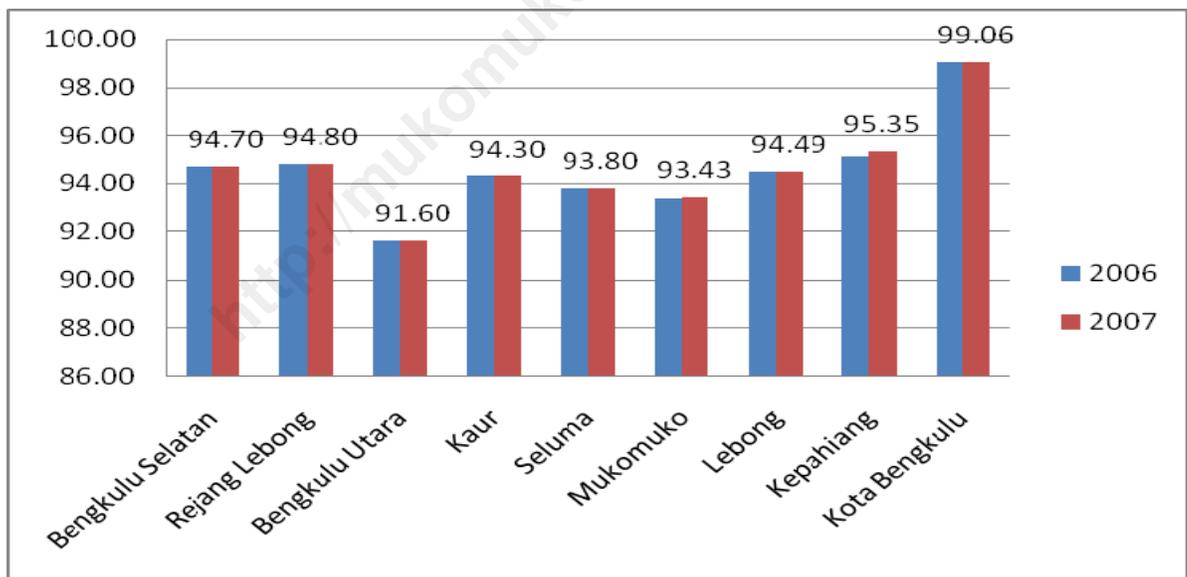
3.3 ANGKA MELEK HURUF DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Dengan pendidikan yang berkualitas diharapkan akan terbentuk manusia yang bermutu, handal, memiliki wawasan luas dan berpandangan jauh kedepan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya.

Dalam konteks inilah, sehingga pendidikan menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia. Se jauh mana kualitas pendidikan penduduk suatu wilayah akan tercermin pada indikator pendidikannya.

Komponen pendidikan atau pengetahuan (*knowledge*) diukur dari kombinasi angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dari penduduk berusia 10 tahun keatas (MYS). Kedua komponen ini dihitung dari data SUSENAS yaitu dari variabel kemampuan baca tulis dan kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Gambar 3. Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu Tahun 2006-2007 (persen)

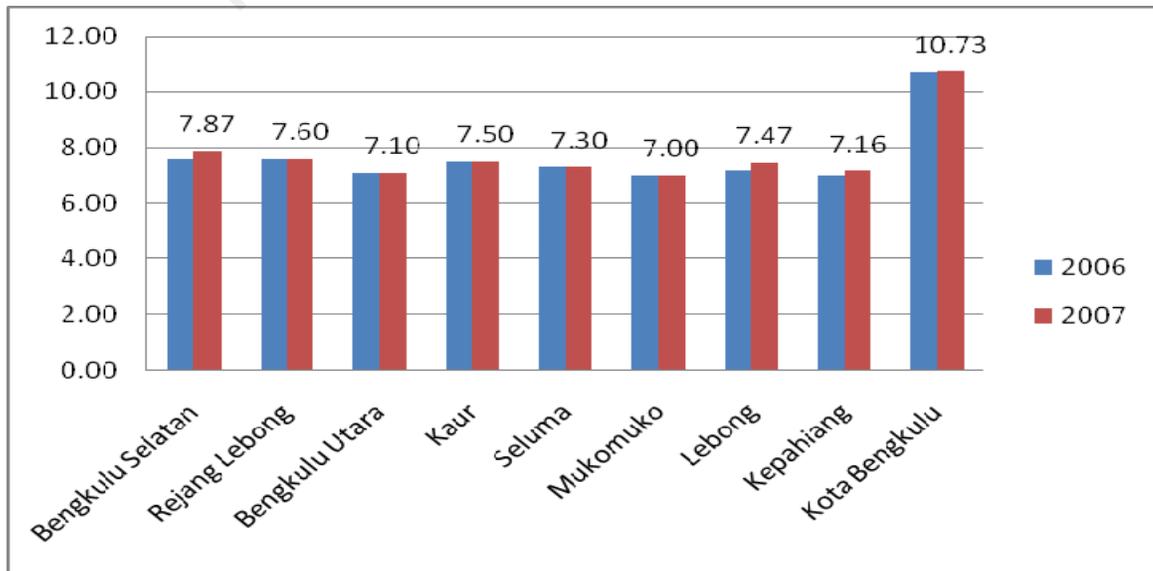


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar 3 menunjukkan Angka Melek Huruf untuk seluruh kabupaten/kota di wilayah propinsi Bengkulu pada tahun 2007 tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2006 kecuali untuk Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kepahiang yang pada tahun 2007 mengalami sedikit peningkatan. Angka Melek Huruf Kabupaten Mukomuko pada tahun

2007 sebesar 93.43 persen. Ini berarti bahwa 93.43 persen penduduk Kabupaten Mukomuko yang berusia 10 tahun keatas dapat membaca dan menulis. Angka ini sedikit meningkat dibanding tahun 2006 yang hanya sebesar 93.37. Bila dibandingkan dengan nilai maksimum komponen Angka Melek Huruf sebesar 100, maka angka 93.43 tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk di Kabupaten Mukomuko sudah baik. Ini artinya Pemerintah Kabupaten Mukomuko perlu berupaya untuk menaikkan kualitas 6.57 persen penduduknya agar Kabupaten Mukomuko ini bebas dari buta aksara sepenuhnya. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Propinsi Bengkulu, maka pada tahun 2007 Kabupaten Mukomuko merupakan kabupaten dengan nilai Angka Melek Huruf paling rendah kedua setelah Bengkulu Utara (91.60). Namun demikian, jika dilihat dari gambar 3, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Angka Melek Huruf antar kabupaten/kota di propinsi Bengkulu ini tidak jauh berbeda, yakni berkisar antara 93 hingga 95 persen kecuali untuk kabupaten Bengkulu Utara dan kota Bengkulu.

Gambar 4. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu Tahun 2006-2007 (tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

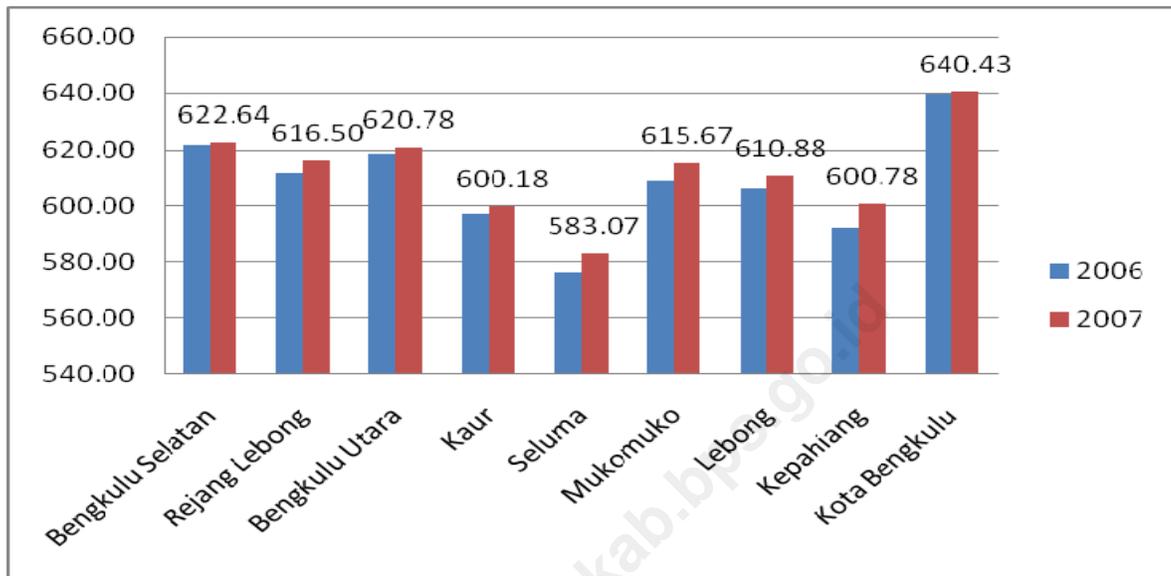
Gambar 4 menunjukkan Rata-Rata Lama Sekolah untuk seluruh kabupaten/kota di wilayah propinsi Bengkulu pada tahun 2007 tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2006 kecuali untuk Kabupaten Bengkulu Selatan, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu yang pada tahun 2007 mengalami sedikit peningkatan. Angka MYS (rata-rata lama sekolah) untuk Kabupaten Mukomuko pada tahun 2007 sebesar 7,00. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk lebih kurang sekitar 7 tahun, yaitu setaraf SLTP.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Propinsi Bengkulu, maka pada tahun 2007 Kabupaten Mukomuko merupakan kabupaten dengan nilai Rata-Rata Lama Sekolah paling rendah. Namun demikian, jika dilihat dari gambar, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Rata-Rata Lama Sekolah antar kabupaten/kota di propinsi Bengkulu ini tidak jauh berbeda, yakni berkisar antara 7 hingga 8 tahun kecuali untuk kota Bengkulu.

3.4 PENGELUARAN PERKAPITA RIIL DISESUAIKAN

Salah satu indikator yang juga digunakan dalam penghitungan IPM adalah Kemampuan Daya Beli Penduduk atau *Purchasing Power parity* (PPP). Kemampuan daya beli ini lebih mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya dan sangat jauh berbeda dengan PDRB perkapita atau yang lebih dikenal dengan *income per kapita*, karena PDRB perkapita bukan merupakan konsumsi riil rumah tangga. Disini dalam penghitungan digunakan pengeluaran riil perkapita disesuaikan.

Gambar 5. Pengeluaran Per Kapita Riil disesuaikan Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu tahun 2006-2007 (Rp. 000)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar 5 menunjukkan Pengeluaran Per Kapita Riil disesuaikan untuk seluruh kabupaten/kota di wilayah propinsi Bengkulu pada tahun 2007 mengalami peningkatan dibanding tahun 2006. Pada tahun 2007 ini, angka pengeluaran riil perkapita disesuaikan untuk kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 615.670,- Kondisi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2006 yang hanya sebesar Rp. 609.100,-. Kondisi ini bisa terus meningkat dari tahun ke tahun tergantung dari kondisi perekonomian nasional. Selain itu peningkatan ekonomi penduduk tidak lepas dari peranan pemerintah, yang salah satunya adalah program pengentasan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Propinsi Bengkulu, maka pada tahun 2007 Kabupaten Mukomuko merupakan kabupaten dengan nilai Pengeluaran Per Kapita Riil disesuaikan tertinggi kelima setelah Kota Bengkulu (Rp. 640.430), Kabupaten Bengkulu Selatan (Rp. 622.640), Kabupaten Bengkulu Utara (Rp. 620.780), dan Kabupaten Rejang Lebong (Rp. 616.500).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mukomuko sedikit meningkat dibanding tahun 2006 yakni dari 67.2 pada tahun 2006 menjadi 67.4 pada tahun 2007. Nilai ini menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mukomuko sudah cukup baik.
2. Angka Melek Huruf Kabupaten Mukomuko pada tahun 2007 sebesar 93.43. Ini berarti bahwa 93.43 persen penduduk Kabupaten Mukomuko yang berusia 15 tahun keatas dapat membaca dan menulis. Bila dibandingkan dengan nilai maksimum komponen Angka Melek Huruf sebesar 100, maka angka 93.43 tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk di Kabupaten Mukomuko sudah baik.
3. Angka MYS (rata-rata lama sekolah) sebesar 7,00. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk lebih kurang sekitar 7 tahun, yaitu setaraf SLTP.
4. Pada tahun 2007 ini, angka pengeluaran riil perkapita disesuaikan sebesar Rp. 615.670,- Kondisi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2006 yang hanya sebesar Rp. 609.100,-.
5. Skor IPM Kabupaten Mukomuko tahun 2007 sebesar 69.19. dengan skor tersebut, Kabupaten Mukomuko termasuk dalam **kelompok menengah atas**.

5.2 SARAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko perlu lebih meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan terutama kesehatan ibu, bayi, anak serta kesehatan lingkungan dan perlunya peningkatan kualitas RSUD baik dari segi kelengkapan fasilitas maupun tenaga ahli (dokter spesialis dan tenaga ahli kesehatan lainnya).
2. Pemerintah Kabupaten Mukomuko perlu melakukan upaya untuk menaikkan kualitas 6.57 persen penduduk yang masih belum melek huruf, sehingga Kabupaten Mukomuko ini bebas dari buta aksara sepenuhnya. Selain itu, Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, tidak hanya dengan memperhatikan masyarakat selaku pihak yang memiliki hak untuk ikut serta dalam pendidikan, ataupun dengan memperbaiki sekolah-sekolah, namun juga dengan memperhatikan nasib guru selaku ujung tombak pencapaian pendidikan berkualitas, terutama nasib guru bantu di daerah-daerah sulit.
3. Kemampuan ekonomi merupakan masalah yang mendasar dan merupakan faktor penyebab terhadap munculnya berbagai permasalahan lain. Salah satu kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan oleh pemerintah misalnya dengan pengembangan dan pembinaan kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, karena pengembangan UMKM di daerah dapat menyerap tenaga kerja .